

# Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia dan Implikasinya terhadap Sistem Pendidikan Nasional

*Muhamad Afandi*

email: [muhammadafandi\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:muhammadafandi_uin@radenfatah.ac.id)  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

## Abstrak

*Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia didukung oleh aspek historis, yuridis, lembaga, dan organisasi keagamaan Islam. Sedangkan jejaring pendidikan Islam Indonesia di level internasional lebih dipengaruhi dari faktor kepemimpinan lembaga pendidikan Islam itu sendiri dalam membangun jaringan. Ada tiga hal yang terkait dengan pendidikan Islam dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003: Pertama, kelembagaan formal, nonformal, dan informal didudukkannya lembaga madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang diakui keberadaannya setara dengan lembaga pendidikan sekolah. Kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yaitu pelajaran agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai, terdapat seperangkat nilai-nilai islami dalam sistem pendidikan nasional.*

**Kata kunci:** Indonesia, Pendidikan Islam, Sistem Pendidikan Nasional

## Abstract

*The development of Islamic education in Indonesia is supported by historical, juridical aspects, institutions and Islamic religious organizations. Meanwhile, the Indonesian Islamic education network at the international level is more influenced by the leadership factor of the Islamic education institution itself in building the network. There are three things related to Islamic education in the National Education System Law Number 20 of 2003: First, formal, non-formal and informal institutions, the establishment of madrasah institutions as one of the formal educational institutions which are recognized as equivalent to school educational institutions. Second, Islamic education as a subject, namely religious studies as one of the subjects that must be given to students in all paths, types and levels of education. Third, Islamic education as a value, there is a set of Islamic values in the national education system.*

**Key words:** Indonesia, Islamic Education, National Education System

## Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu sarana paling efektif untuk membangun karakter suatu bangsa. Pendidikan secara umum dapat dipahami sebagai media atau alat (tools) bagi pencapaian pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan era sekarang ini tetap dianggap sebagai kekuatan utama dalam menghadapi tuntutan dunia yang mengglobal, baik pada sektor peningkatan kualitas terhadap dunia informasi dan teknologi ataupun kepada persoalan

peningkatan moral dan akhlak, yang penekanannya pada etik pendidikan dan peran moral. Pendidikan adalah salah satu faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh terhadap perubahan sosial. Melalui pendidikan diharapkan bisa menghasilkan para generasi penerus yang mempunyai karakter yang kokoh untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Dengan demikian, pendidikan harus benar-benar dimaksimalkan dalam segala aspeknya.<sup>1</sup>

Menurut Wardiman Joyonegoro, manusia yang berkualitas itu setidaknya-tidaknya mempunyai dua kompetensi, yaitu kompetensi bidang imtaq (iman dan taqwa) dan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Dua hal inilah yang menjadi garapan lembaga pendidikan Islam, namun kenyataannya lembaga pendidikan Islam (baca: madrasah) masih mengalami kendala dalam pengembangan sumberdaya manusia. Oleh karena itu, lembaga pendidikan diharapkan merubah paradigmanya baik dari sisi manajemen, kepemimpinan, perubahan kurikulum, serta budaya mutu yang berkelanjutan. Lembaga pendidikan Islam dihadapkan berbagai persoalan yang mendasar, ia ibaratnya dua sisi mata uang, mengemban nilai-nilai moralitas yang dikembangkan dari basis Agama, biasanya yang berbasis agama bersifat absolut, susah untuk berubah, dan juga menghadapi arus globalisasi yang tidak mengenal batas-batas wilayah etika lokal.<sup>2</sup>

Terkait dengan pendidikan Islam tidak terlepas dari sumber ilmu yang didasarkan Al-qur'an dan al-Hadits. Pandangan yang berusaha untuk tidak mendikotomikan antara pendidikan umum dan Pendidikan Islam, sebagaimana yang saat ini sedang terjadi. Karena pada prinsipnya pendidikan Islam maupun pendidikan umum, terdapat tata nilai-nilai (values) dan kebijaksanaan (wisdom). Namun dalam realitas dan konstelasi perpolitikan dan pendidikan di tanah air, antara pendidikan umum dan pendidikan Islam tidak diposisikan secara setara (equal), baik menyangkut kebijakan (policy), penganggaran, penyediaan sarana dan prasarana penunjang, sampai kepada persoalan-persoalan teknis lain.<sup>3</sup>

Keberadaan sistem pendidikan Islam Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan, antara lain: pengakuan lulusan yang dihasilkan oleh madrasah sebagai sistem pendidikan Islam sampai pada persoalan tata kelola madrasah yang terkesan semrawut. Sementara itu,

---

<sup>1</sup> Kholilur Rahman, "Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia," *Jurnal Tarbiyatuna: Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 1 (15 Februari 2018): 1-14.

<sup>2</sup> Moh Sakir, "Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional," *Cendekia* 12, no. 1 (2014). 103-120

<sup>3</sup> Sakir. Pendidikan Islam dalam..., 103-120

perkembangan yang terjadi dalam kehidupan sosial, memaksa madrasah harus tetap eksis tanpa harus mengorbankan nilai-nilai yang telah dirintis oleh para ulama sebagai pendiri madrasah. Dalam suasana yang demikian tentu madrasah harus mengubah paradigma sebagai lembaga pendidikan yang “liar” sebagaimana label tersebut pernah diberikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda menjadi lembaga pendidikan yang mengikuti kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Karena bagaimanapun juga sistem pendidikan Islam Indonesia telah menjadi bagian dari Sistem Pendidikan Nasional dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).<sup>4</sup>

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka atau studi literatur yang berkaitan dengan pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Literatur atau sumber-sumber rujukan yang menjadi fokus pembahasan ini yang bersumber dari buku, jurnal artikel, dan dokumen terkait dengan fokus pembahasan penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui pemeriksaan kembali data (editing), mengorganisir data yang diperoleh (organizing), dan melakukan analisis lanjutan sehingga ditemukan kesimpulan (finding). Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisis dan membahas secara mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak.<sup>5</sup>

## **Pembahasan**

### **Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia**

Berdiskusi tentang jejaring pendidikan Islam nasional atau dalam konteks Indonesia tentu saja tidak terlepas dari perjalanan pendidikan Islam itu sendiri baik secara historis, kelembagaan, dan juga yuridis. Perkembangan pendidikan Islam yang terjadi saat ini tentu saja karena adanya kontribusi dari faktor-faktor dan komponen-komponen yang mempengaruhinya. Pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Dalam perjalanannya, pendidikan Islam telah melalui proses yang panjang. Dari zaman sebelum kemerdekaan hingga sampai saat ini di zaman

---

<sup>4</sup> Miftahul Huda, “Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Dan Upaya Penguatannya Dalam Sistem Pendidikan Nasional,” *Journal of Islamic Education Research* 1, no. 02 (29 Juni 2020): 39–53, <https://doi.org/10.35719/jier.v1i02.24>.

<sup>5</sup> Salmaa, “Studi Literatur: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Teknik Pengumpulan Datanya,” *Penerbit Deepublish* (blog), 17 Maret 2023, <https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/>.

yang sudah modern atau dikenal dengan abad 21, pendidikan Islam tetap berdiri kokoh dan hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Lembaga-lembaga pendidikan Islam selalu berbenah dan mampu beradaptasi sesuai dengan tuntutan zaman. Tentu saja ini tidak mudah dan banyak tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Islam itu sendiri. Melalui jejaring pendidikan Islam yang kuat secara nasional di Indonesia, baik itu melalui organisasi keagamaan Islam, melalui lembaga-lembaga yang menaunginya, tokoh agama dan masyarakat tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut memberikan kontribusi terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

### **1. Pendidikan Islam di Indonesia dalam Kajian Historis**

Berita Islam di Indonesia telah diterima sejak orang Venesia (Italia) yang bernama Marcopolo singgah di kota Perlak dan menerangkan bahwa sebagian besar penduduknya telah beragama Islam.<sup>6</sup> Sampai sekarang belum ada bukti tertulis tentang kapan tepatnya Islam masuk ke Indonesia, namun banyak teori yang memperkirakannya. Pada umumnya teori-teori tersebut dikaitkan dengan jalur perdagangan dan pelayaran antara Dunia Arab dengan Asia Timur. Pulau Sumatra misalnya, karena letak geografisnya, sejak awal abad pertama Masehi telah menjadi tumpuan perdagangan antarbangsa dan pedagang-pedagang yang datang ke Sumatra.<sup>7</sup>

Meneliti sejarah bangsa Indonesia tidak akan lepas dari umat Islam, baik dari perjuangan melawan penjajah maupun dalam lapangan pendidikan. Melihat kenyataan betapa bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam mencapai keberhasilan dengan berjuang secara tulus ikhlas mengabdikan diri untuk kepentingan agamanya disamping mengadakan perlawanan militer. Perlu diketahui bahwa sejarah pendidikan Islam di Indonesia mencakup fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, baik formal maupun non formal. Yang dikaji melalui pendekatan metode oleh sebab itu pada setiap disiplin ilmu jelas membutuhkan pendekatan metode yang bisa memberikan motivasi dan mengaktualisasikan serta

---

<sup>6</sup> Mansur, *Peradaban Islam dalam Lintasan Sejarah* (Jogjakarta: Global Pustaka Utama, 2004).

<sup>7</sup> Teuku Ibrahim Alfian, *Kontribusi Samudra Pasai terhadap Studi Islam Awal di Asia Tenggara* (Jogjakarta: Ceninets, 2005).

memfungsikan semua kemampuan kejiwaan yang material, naluriah, dengan ditunjang kemampuan jasmaniah, sehingga benar-benar akan mendapatkan apa yang telah diharapkan.<sup>8</sup>

#### a. Pendidikan Islam Masa Penjajahan Belanda

Penaklukan bangsa Barat atas dunia Timur dimulai dengan jalan perdagangan, kemudian dengan kekuatan militer. Selama zaman penjajahan Barat itu berjalanlah proses westernisasi Indonesia. Kedatangan bangsa Barat memang telah membawa kemajuan teknologi. Tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil penjajahannya, bukan untuk kemakmuran bangsa yang dijajah. Begitu pula di bidang pendidikan. Mereka memperkenalkan sistem dan metode baru tetapi sekedar untuk menghasilkan tenaga yang dapat membantu kepentingan mereka dengan upah yang murah dibandingkan dengan jika mereka harus mendatangkan tenaga dari Barat. Apa yang mereka sebut pemabaharuan pendidikan itu adalah westernisasi dari kristenisasi yakni untuk kepentingan Barat dan Nasrani.

Secara umum sistem pendidikan pada masa VOC dapat digambarkan sebagai berikut: (1) Pendidikan Dasar, (2) Sekolah Latin, (3) Seminarium Theologicum (Sekolah Seminari), (4) Academie der Marine/Akademi Pelayanan, (5) Sekolah Cina, (6) Pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam yang telah ada dipondok pesantren, masjid, musholah, atau yang lainnya tidak membantu pemerintah Belanda menjadi acuan pada waktu itu. Dengan begitu mereka terapkan berbagai peraturan dan kebijakan diantaranya.<sup>9</sup>

- 1) Pada tahun 1882 pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus pendidikan Islam yang mereka sebut *priesterraden*. Dari nasihat badan inilah pada tahun 1902 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru yang isinya bahwa orang yang memberikan pengajaran atau pengajian agama Islam harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintah Belanda
- 2) Tahun 1925 keluar lagi peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan agama Islam yaitu bahwa tidak semua orang (*kiai*) boleh memberikan pelajaran mengaji terkecuali telah mendapat semacam rekomendasi atau persetujuan pemerintah Belanda
- 3) Kemudian pada tahun 1932 keluar lagi peraturan yang isinya berupa kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinya atau memberikan

---

<sup>8</sup> Fedry Saputra, "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia," *Al-Hikmah (Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam)* 3, no. 1 (22 Januari 2021): 98–108, <https://doi.org/10.36378/al-hikmah.v3i1.1137>.

<sup>9</sup> Saputra. Sejarah Pertumbuhan dan... 98-108

pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda yang disebut ordonasi sekolah liar (wilde school ordonantie)

#### b. Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang

Kejayaan penjajah Belanda lenyap setelah Jepang berada di Indonesia. Mereka bertekuk lutut tanpa syarat kepada Jepang. Tujuan Jepang ke Indonesia ialah menjadikan Indonesia sebagai sumber bahan mentah dan tenaga manusia yang sangat besar artinya bagi kelangsungan perang Pasifik. Hal ini sesuai dengan cita-cita politik ekspansinya. Mengenai pendidikan zaman Jepang disebut Hakko Ichiu yakni mengajak bangsa Indonesia bekerjasama dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Oleh karena itu pelajar setiap hari terutama pada pagi hari harus mengucapkan sumpah setia kepada kaisar Jepang, lalu dilatih kemiliteran. Sistem persekolahan di zaman pendudukan Jepang banyak perbedaannya dibandingkan dengan penjajahan Belanda. Sekolah-sekolah yang ada pada zaman Belanda diganti dengan sistem Jepang. Segala daya upaya ditujukan untuk kepentingan perang. Murid-murid hanya mendapat pengetahuan yang sedikit sekali, hampir sepanjang hari hanya diisi dengan kegiatan latihan atau bekerja.

Sementara itu terhadap pendidikan Islam, Jepang mengambil beberapa kebijakan antara lain:<sup>10</sup>

- 1) Mengubah Kantoer Voor Islamistische Zaken pada masa Belanda yang dipimpin kaum orientalis menjadi Sumubi yang dipimpin tokoh Islam sendiri, yakni K.H. Hasyim Asy'ari.
- 2) Pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan pemerintah Jepang
- 3) Mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar seni kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah pimpinan K.H. Zainal Arifin
- 4) Mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir dan Bung Hatta
- 5) Diizinkannya ulama dan pemimpin nasionalis membentuk barisan Pembela Tanah Air (PETA) yang belakangan menjadi cikal-bakal TNI di zaman kemerdekaan
- 6) Diizinkannya Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) terus beroperasi, sekalipun kemudian dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang menyertakan dua ormas besar Islam, Muhammadiyah dan NU Lepas dari tujuan semula

---

<sup>10</sup> Saputra. Sejarah Pertumbuhan dan... 98-108

Jepang memfasilitasi berbagai aktivitas kaum muslimin ketika itu, nyatanya hal ini membantu perkembangan Islam dan keadaan umatnya setelah tercapainya kemerdekaan.

#### c. Pendidikan Islam Masa Kemerdekaan (Orde Lama)

Penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah setelah Indonesia merdeka, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945, yang menyebutkan bahwa : Madrasah dan pesantren pada hakekatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan dari pemerintah.

Pada tahun 1958 pemerintah mendorong untuk mendirikan Madrasah Negeri dengan ketentuan kurikulum 30% pelajaran agama dan 70% pelajaran umum. Sistem penyelenggaraannya sama dengan sekolah-sekolah umum dengan perjenjangan (Musyirifah Sunanto, 2005) sebagai berikut: (1) Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) setingkat SD lama belajar enam tahun, (2) Nadrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) setingkat SMP lama belajar tiga tahun, (3) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) setingkat SMA lama belajar tiga tahun.<sup>11</sup>

Perkembangan madrasah yang cukup penting pada masa Orde Lama adalah berdirinya madrasah Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Tujuan pendiriannya untuk mencetak tenaga tenaga profesional yang siap mengembangkan madrasah sekaligus ahli keagamaan yang profesional. PGA pada dasarnya telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Khususnya di wilayah Minangkabau, tetapi pendiriannya oleh Departemen Agama menjadi jaminan strategis bagi kelanjutan madrasah di Indonesia.

#### d. Pendidikan Islam Masa Orde Baru

Pemerintahan memandang bahwa agama mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dan strategis. Peran utama agama sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pembangunan nasional, agama juga berpengaruh untuk membersihkan jiwa manusia dan kemakmuran rakyat. Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, warga dan masyarakat hingga akhirnya dapat menjiwai kehidupan bangsa dan negara.<sup>12</sup>

##### 1) Pendidikan Agama dan Sistem Pendidikan Nasional

---

<sup>11</sup> Saputra. Sejarah Pertumbuhan dan... 98-108

<sup>12</sup> Saputra. Sejarah Pertumbuhan dan... 98-108

Melalui perjalanan panjang proses penyusunan sejak tahun 1945-1989 UU nomor 2 tahun 1989, sebagai usaha untuk mengintegrasikan pendidikan Islam dan umum. Untuk mengembangkan pendidikan Islam haruslah mempunyai lembaga lembaga pendidikan, sehingga menjadi "lahan subur" tempat persemaian generasi baru.

## 2) Pengintegrasian Pelajaran Agama dan Pelajaran Umum

Integrasi merupakan pembauran sesuatu sehingga menjadi kesatuan, sedangkan integrasi pendidikan adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam pendidikan dan integritas pendidikan memerlukan integritas kurikulum atau secara khusus memerlukan integritas pelajaran. Karena sasaran akhir dari pendidikan (agama) adalah untuk menciptakan manusia yang bisa mengintegrasikan diri, mampu menggunakan imannya dalam menjawab tantangan hidup dan mampu memanusiakan sesamanya dengan berbagai kehidupan yang sejahtera yang dikaruniakan Allah pada manusia. Dengan kata lain, pendidikan dimaksudkan untuk memajukan manusia dalam mengambil bagian secara aktif, kreatif dan kritis. Untuk melaksanakan suatu yang lebih baik dari masa lalu, pelajaran agama dan mata pelajaran umum ditentukan guru yang memiliki integritas keilmuan yang memadai dalam pendidikan. Sehingga bisa menemukan cara untuk dapat menghubungkan bagian-bagian dari suatu bidang dari suatu bidang studi, satu pelajaran dengan mata pelajaran yang lain.

## e. Pendidikan Islam Masa Reformasi

Apabila kita berbicara mengenai pendidikan Islam maka kita akan membicarakan mengenai pesantren dan madrasah. Menurut para pakar pendidikan Islam bentuk pendidikan yang indigenous adalah pesantren yang telah hidup dan berada di dalam budaya Indonesia sejak zaman prasejarah yang kemudian dilanjutkan pada masa Hindu-Budha dan diteruskan pada masa kebudayaan Islam. Madrasah adalah bentuk pendidikan klasikal yang masuk ke Indonesia sejalan dengan arus modernisasi Islam. Pesantren yang mempunyai pengertian archaic, juga mempunyai konotasi kemasyarakatan, bahkan suatu kesatuan ekonomis dan mungkin pula politik selain daripada suatu masyarakat pendidikan dengan nuansa agama. Madrasah juga lebih berkonotasi kepada cara penyampaian ilmu maupun agama secara klasikal dan lebih modern. Namun keduanya mempunyai kesamaan yaitu telah tumbuh dan dimiliki oleh masyarakat sekitar terutama di daerah pedesaan karena pengaruh historis. Oleh

sebab itu pendidikan pesantren dan madrasah cenderung bersifat tradisional dan ortodoks sungguh pun tidak selalu benar sebagaimana yang kita lihat di dalam perkembangan pesantren modern seperti Pesantren Tebuireng.

Oleh karena itu perlu kita kaji apa yang merupakan kekuatan dan kelemahan dari pendidikan pesantren dan madrasah.<sup>13</sup>

#### 1) Kekuatan Pendidikan Islam: Pendidikan yang Lahir dari Masyarakat

Dalam era reformasi dewasa ini dan sejalan dengan gelombang demokratisasi di dunia dan di Indonesia maka kita berbicara mengenai tuntutan hak rakyat termasuk pendidikan.

#### 2) Kelemahan: Cenderung Kepada Ortodoksi

Apabila kita teliti kekuatan dari pendidikan pesantren dan madrasah justru disitulah pula terletak kelemahannya. Dalam perjalanan sejarah, sistem pendidikan pesantren dan madrasah telah terlempar dari mainstream pendidikan baik pada masa kolonial, masa pendudukan Jepang, maupun pada masa kemerdekaan. Kelemahannya terletak kepada keunikannya bahwa pesantren dan madrasah tumbuh dari bawah, dari masyarakat sendiri. Sesuai dengan permasalahan-nya.

#### 3) Pengelolaan pendidikan Islam

Pengelolaan pendidikan Islam meliputi empat bidang prioritas, yaitu: (1) Peningkatan kualitas, (2) Pengembangan inovasi dan kreativitas, (3) Membangun jaringan kerja sama (networking), dan (4) Pelaksanaan otonomi daerah.

#### f. Pendidikan Islam di Era Globalisasi

Pendidikan Islam di Indonesia meliputi beragam kelembagaan, seperti pesantren, madrasah, dan pendidikan Islam yang secara khusus diselenggarakan dalam system sekolah Islam dan sekolah umum. Berikut dampak globalisasi terhadap pendidikan Islam di Indonesia:

#### 1) Penerapan prinsip non dikotomi dalam ilmu di lembaga pendidikan Islam

Ketika pandangan kaum santri (masyarakat muslim) terhadap dunia pendidikan modern dan kehidupan duniawi berubah hampir berbalikan, muncul kritik dan koreksi terhadap modernisasi pendidikan Islam, yakni seolah terdapat pertentangan antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu sekuler atau non agama (profan). Koreksi ini juga dibenarkan oleh Azyumardi, tradisi dan modernisasi menuju milenium yang menyatakan meski Islam pada dasarnya tidak membedakan nilai antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum (non agama), tetapi dalam prakteknya, supremasi lebih diberikan kepada ilmu-ilmu agama.

---

<sup>13</sup> Saputra. Sejarah Pertumbuhan dan... 98-108

Ini disebabkan sikap keagamaan dan kesalehan yang memandang ilmu-ilmu agama sebagai “jalan tol” menuju Tuhan.<sup>14</sup> Fakta ini kemudian direspon dengan memunculkan ide untuk menerapkan model pendidikan yang non dikotomik antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu sekuler atau umum di lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Hasilnya adalah:

a) Islamisasi ilmu-ilmu sekuler (umum)

Dalam perkembangannya sekolah-sekolah Islam, madrasah atau sekolah terus menghadapi problem hubungan Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Masalah ini berkaitan dengan pembedaan ilmu. Selama ini ilmu dibedakan antara ilmu murni dan ilmu terapan, ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora.<sup>15</sup> Lantas muncul pertanyaan dimana letak studi Islam dalam pembedaan ilmu tersebut? apakah pada ilmu sosial, terapan, atau humaniora? Akibat tajamnya dari pertentangan ini lulusan pendidikan Islam di tingkat dasar sampai perguruan tinggi kalah bersaing dengan lulusan sekolah modern lainnya dan tampak kurang menguasai ilmu dan teknologi modern (umum). Lembaga pendidikan Islam kemudian mencoba mengakomodasi keduanya tanpa kesatuan dasar epistemologi dan sistem. Islamisasi ilmu-ilmu sekuler dilakukan untuk mengurangi problem ini dan untuk meningkatkan daya saing lembaga pendidikan Islam dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dengan sekolah atau lembaga pendidikan modern lain. Gagasan “Islamisasi ilmu pengetahuan” diprakarsai oleh peminat semacam Ismail al-Faruqi, atau S.M.N. Alatas. Namun pada kenyataannya islamisasi ilmu-ilmu sekuler menurut Munir Mulhan ternyata tidak cukup untuk menjawab problem pembedaan ilmu secara dikotomik yaitu antara ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum.<sup>16</sup>

b) Perubahan radikal sistem kelembagaan: dari institut ke universitas.

Dalam peradaban global, mekanisme ekonomi merupakan dasar hubungan sosial yang berinti pada tradisi dan logika pasar. Disini keberlakuan nilai ditentukan fungsinya bagi pemenuhan kebutuhan pragmatis manusia. Dan partisipasi manusia dalam keagamaan dan aktivitas sosial ditentukan oleh fungsi pragmatis bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Seluruh doktrin surga dan neraka, dosa dan pahala, dilihat masyarakat dalam logika pasar yang semakin terbuka. Kebenaran teologis bukan lagi jaminan masa depan

---

<sup>14</sup> Abdul Munir Mulhan, *Nalar Spiritual Pendidikan -Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2002).

<sup>15</sup> Mulhan. *Nalar Spiritual Pendidikan...*

<sup>16</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999).

lembaga pendidikan Islam, tetapi kemampuan kompetitif yang berkeunggulan, dan kemampuan memberi jaminan pemenuhan kebutuhan pragmatis umat dan masyarakat. Sebab bagi publik, kebenaran dan kebaikan Islam, bukan karena bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan fungsi pragmatisnya. Sehingga banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia berusaha untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa ilmu-ilmu keislaman juga berfungsi pragmatis. Salah satu respon yang dilakukan adalah merubah status lembaga pendidikan, seperti dari institut menjadi universitas (kasus IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN, dan IKIP menjadi universitas, IAIN Sunan Ampel menjadi UIN Sunan Ampel). Perubahan kelembagaan ini tentunya membawa konsekuensi berupa pembukaan fakultas-fakultas dan jurusan-jurusan pendidikan baru yang biasanya hanya terdapat di pendidikan umum yang sebelumnya belum pernah ada.<sup>17</sup>

- c) Perubahan kurikulum dalam lembaga pendidikan Islam yang berorientasi pada modernitas dan kebutuhan masyarakat.

Perubahan orientasi nilai oleh masyarakat pada hal-hal yang lebih pragmatis, tidak semuanya disikapi dengan perubahan status kelembagaan sebab membutuhkan biaya dan kesiapan struktur kelembagaan yang memadai. Ada juga yang sekedar memasukkan ilmu-ilmu umum sebagai pelajaran tambahan.<sup>18</sup>

- 2) Modernisasi administrasi lembaga pendidikan Islam

Modernisasi pendidikan juga menuntut modernisasi system administrasinya ter utama menyangkut menejerial. Modernisasi dilakukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan orientasi kelembagaan. Perubahan-perubahan tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa diikuti dengan perubahan menejerial dan administrasi pendidikan secara keseluruhan. Lembaga pendidikan yang masih berpegang pada kerangka administrasi tradisional akan sulit untuk mengembangkan diri secara baik, sebab dengan mempertahankan sistem administrasi yang tidak rasional akan menjadi kendala tersendiri dalam perubahan.<sup>19</sup>

- 3) Bekurangnya jumlah santri atau murid pada lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tidak mengakomodasi kecenderungan modernisasi dan kebutuhan masyarakat industri

Kondisi ini banyak dialami bagi pesantren, madrasah dan sekolah-sekolah Islam yang tidak melakukan perubahan sebagaimana lembaga pendidikan Islam atau pendidikan umum terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Sementara bagi pesantren dan

---

<sup>17</sup> Azra. Pendidikan Islam Tradisi...

<sup>18</sup> Dila Fitri Nabila dan Abd Hayyi, "Dampak Globalisasi Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (16 September 2019): 552–73.

<sup>19</sup> Nabila dan Hayyi. Dampak Globalisasi Terhadap...

madrasah atau sekolah-sekolah Islam yang mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap akses pasar kerja relatif bertahan dan berkembang dengan baik.<sup>20</sup>

4) Bangkitnya sekolah elit muslim di perkotaan

Secara kuantitatif pesantren mengalami peningkatan jumlah, dari segi fisik pun mengalami kemajuan, sehingga citra sebagai tempat pendidikan yang kumuh dan reot semakin terkikis. Pesantren baru muncul dimana-mana tidak hanya di Jawa melainkan juga di luar Jawa seperti di Sumatra. Namun yang menarik pertumbuhan pesantren ini dikalangan masyarakat urban (kota). Bisa jadi ini merupakan bentuk kekhawatiran para orang tua terhadap efek globalisasi dan modernisme. Para orang tua di daerah urban, merasa perlu pendidikan agama untuk anak-anaknya atau perlu pendidikan yang komprehensif yang memadukan unsur agama juga unsur pendidikan umum. Pendidikan Islam ini umumnya sangat mahal dan untuk ukuran masyarakat muslim di pedesaan sangat berat. Pendidikan Islam ini berusaha memenuhi harapan para orang tua di kalangan masyarakat urban untuk memberikan pendidikan yang sempurna, agama maupun umum dengan kualitas yang baik. Sehingga para orang tua juga tidak khawatir, meski anaknya disekolahkan di lembaga pendidikan Islam namun tetap dengan kualitas yang diberikannya tidak akan kalah saing di pasar kerja dengan lembaga pendidikan umum. Contoh kasus di kota Semarang adalah Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar, Yayasan Pendidikan Islam Nasima, Pendidikan Hj. Isriyati dan lain-lain. Bisa jadi peningkatan pertumbuhan pendidikan Islam di daerah-daerah urban mengisyaratkan secara implisit bahwa, dunia Islam tradisi dalam segi-segi tertentu masih relevan ditengah deru modernisasi dan globalisasi.<sup>21</sup>

5) Naiknya biaya sekolah di lembaga pendidikan Islam di perkotaan

Berubahnya orientasi dasar filosofis sebagian lembaga pendidikan Islam sekedar menjadi penyedia jasa untuk pasar kerja dan pencabutan subsidi di bidang pendidikan sebagai akibat dari kesepakatan antara IMF dengan pemerintah Indonesia untuk mengurangi pengeluaran negara yang dianggap tidak efektif dan efisien dalam rangka restrukturisasi ekonomi Indonesia paska krisis serta untuk mempersiapkan liberalisasi sektor pendidikan, mengakibatkan biaya pendidikan semakin melambung. Masyarakat yang paling menderita

---

<sup>20</sup> Nabila dan Hayyi. Dampak Globalisasi Terhadap...

<sup>21</sup> Azra, Pendidikan Islam Tradisi....

lagi adalah kaum muslim yang mayoritas adalah kalangan menengah kebawah seperti petani. Tentunya akan semakin banyak generasi muda muslim yang tidak dapat menikmati atau putus sekolah. Sebab pendidikan telah mengabdikan pada industri. Mahalnya pendidikan Islam modern juga turut menciptakan kalangan elit Islam sebagai pihak yang mampu menjangkau biaya pendidikan terutama pendidikan yang berkualitas.<sup>22</sup>

## **2. Pendidikan Islam di Indonesia dalam aspek Yuridis**

Kemerdekaan membuahkan sesuatu yang luar biasa besar manfaatnya bagi kaum muslimin, terutama di bidang pendidikan modern. Seperti yang tertera dalam tujuan nasional bangsa Indonesia adalah seperti yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut: “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan atas dasar hasrat ketauhidan, motivasi ibadah, dan semangat dakwah untuk memmanifestasikan/mengejawantahkan nilai-nilai Islam, baik nilai ketuhanan maupun nilai kemanusiaan, melalui kegiatan pendidikan sebagaimana tercakup dalam lima program dan praktek pendidikan Islam. Sedangkan Ahmat Tafsir memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.<sup>23</sup>

Hal ini sesuai dengan rumusan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa; ”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab”.

Secara eksplisit dalam UUSPN No 20 tahun 2003, tidak disebutkan sama sekali tentang pendidikan Islam, baik dalam pasal, ayat ataupun dalam penjelasannya. Namun hal tersebut tidak kemudian serta merta meniadakan peran pendidikan Islam, karena secara implisit ternyata dalam beberapa pasal tetap mengakui adanya (jalur pendidikan formal, nonformal,

---

<sup>22</sup> Nabila dan Hayyi, “Dampak Globalisasi Terhadap...”

<sup>23</sup> Sakir, “Pendidikan Islam dalam...”

dan informal) yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Islam berupa madrasah (pasal 17-18). Dan juga mengakomodasi majlis taklim (pasal 26 ayat 4) dalam jalur pendidikan nonformal, serta mengakui lembaga pesantren sebagai pendidikan berbasis masyarakat (pasal 55 ayat 1).<sup>24</sup>

Meskipun UUSPN 2003 mengakui pendidikan Islam secara yuridis, pada kenyataannya jauh sebelum itu lembaga pendidikan Islam (madrasah dan pesantren) telah melakukan proses pendidikan bagi bangsa Indonesia. Pada kenyataannya pendidikan Islam mampu memberi warna dalam membentuk karakter bangsa, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sampai saat ini pendidikan Islam berusaha untuk bertahan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan umat Islam.

Untuk itu era sekarang, DPR dan Pemerintah peduli terhadap peningkatan pendidikan nasional yang dituangkan ke dalam bentuk UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU tersebut terutama pada BAB VI (Pasal 17 ayat 2) dikatakan bahwa pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsnawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman di atas madrasah sudah menjadi bagian sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, umat Islam perlu mengapresiasi dan mengembangkan supaya madrasah menjadi pendidikan ideal yang mampu membawa masyarakat Islam umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya untuk mewujudkan masyarakat madani.

Meski secara landasan yuridis pendidikan Islam tidak disebut secara eksplisit, namun legitimasi terhadap keberadaan pendidikan Islam secara implisit disebut dengan jelas dalam beberapa ayat dalam UUSPN 2003. Hal tersebut tidak serta merta mampu merubah kualitas pendidikan Islam kearah yang lebih baik. Pada kenyataannya pembenahan yang dilakukan terhadap kurikulum, kompetensi pendidik, sarana-prasarana, pendanaan. supaya pendidikan Islam lebih maju tidak bisa hanya mengandalkan dari pemerintah saja (Kementerian Agama) saja.<sup>25</sup>

### **3. Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia**

---

<sup>24</sup> Sakir. "Pendidikan Islam dalam..."

<sup>25</sup> Sakir. "Pendidikan Islam dalam..."

Berbicara tentang pendidikan Islam di tanah air, secara kelembagaan diklasifikasikan menjadi lima jenis yaitu : 1). pendidikan pondok pesantren, 2) pendidikan madrasah sebagai sekolah umum dengan ciri khas agama islam dan perguruan tinggi Islam (STAIN/IAIN/UIN) yang bernaung di bawah Kementerian Agama, 3) pendidikan umum yang bernafaskan Islam, yang diselenggarakan atau dibawah naungan organisasi islam, 4) pelajaran agama Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah semata 5) pendidikan islam dalam keluarga atau di tempat-tempat ibadah, forum pengajian, majelis taklim, dan jenis lainnya yang diprakarsai masyarakat (jenis pendidikan Islam nonformal).<sup>26</sup>

Madrasah adalah institusi pendidikan atau sekolah umum yang memiliki kurikulum dengan penambahan pelajaran-pelajaran tentang keislaman. Berbeda dengan sekolah lainnya yang pembinaanya di bawah Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Madrasah dikelola di bawah pembina Kementerian Agama. Terdapat tiga jenjang Madrasah yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang setara dengan SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang setara SMP, dan Madrasah Aliyah (MA) yang setara SMA. Sedangkan RA adalah jenjang pendidikan anak usia dini yang setara dengan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan pengelolaan di bawah binaan Kementerian Agama. Sebagaimana Ayo Madrasah kutip dari situs Emis Pendis Kemenag, hingga Semester Genap 2015/2016, jumlah RA dan Madrasah di Indonesia mencapai 77.336 lembaga. RA (Raudlatul Athfal) 27,999, MI (Madrasah Ibtidaiyah) 24,560, MTs (Madrasah Tsanawiyah) 16,934, MA (Madrasah Aliyah) 7,843.<sup>27</sup>

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri /PTKIN berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama. Ada tiga jenis perguruan tinggi yang termasuk ke dalam kategori ini, yaitu universitas Islam negeri (UIN), institut agama Islam negeri (IAIN), dan sekolah tinggi agama Islam negeri (STAIN). Saat ini PTKIN berjumlah 58 yang terdiri dari 29 UIN, 24 IAIN, dan 5 STAIN. Penerimaan mahasiswa UIN, IAIN, dan STAIN se-Indonesia dapat dilakukan melalui Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN), Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) dan Jalur Mandiri yang diatur oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

<sup>27</sup> Al Moon, "Berapakah Jumlah RA & Madrasah di Indonesia?," *Ayo Madrasah* (blog), 2023, <https://www.ayomadrasah.id/2016/07/jumlah-ra-madrasah-di-indonesia.html>.

<sup>28</sup> Wikipedia, "Daftar Perguruan Tinggi Islam negeri di Indonesia," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 2023, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daftar\\_perguruan\\_tinggi\\_Islam\\_negeri\\_di\\_Indonesia&oldid=22669869](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daftar_perguruan_tinggi_Islam_negeri_di_Indonesia&oldid=22669869).

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) adalah perguruan tinggi di Indonesia yang pembinaannya berada di bawah Kementerian Agama. Secara teknis akademik, pembinaan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud), sedangkan secara fungsional dilakukan oleh Kementerian Agama melalui direktorat jendral pendidikan Islam (Ditjen Pendis). Jumlah PTKIS di Indonesia berjumlah 880. Hanya karena suatu perguruan tinggi membawa nama Islam maupun organisasi Islam, bukan berarti secara otomatis perguruan tinggi tersebut berada di bawah pembinaan Ditjen Pendis. Mereka bisa sepenuhnya di bawah Kemendikbud maupun hanya Fakultas Agama Islamnya (FAI) yang berada di bawah pembinaan Ditjen Pendis. Seperti contohnya Universitas Islam Indonesia yang dibina oleh Kemendikbud, maupun Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang hanya FAInya yang berada di bawah pembinaan Ditjen Pendis Kemenag.<sup>29</sup>

Berdasarkan data Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, terdapat 30.494 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia pada periode tahun ajaran 2020/2021. Berdasarkan wilayahnya, Jawa Barat menyumbang jumlah pondok pesantren terbanyak di Tanah Air pada periode tersebut. Jumlahnya mencapai 9.310 pondok pesantren atau sekitar 30,53% dari total pondok pesantren secara nasional. Banten menempati peringkat kedua dengan total 5.344 pondok pesantren pada periode yang sama. Jawa Timur menyusul di peringkat ketiga dengan 5.121 pondok pesantren. Lalu, sebanyak 3.927 pondok pesantren berada di Jawa Tengah. Kemudian, ada sebanyak 1.286 pondok pesantren dan 904 pondok pesantren berada di Aceh dan Lampung. Nusa Tenggara Barat tercatat memiliki 730 pondok pesantren. Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan DI Yogyakarta masing-masing memiliki 378 pondok pesantren, 342 pondok pesantren, dan 337 pondok pesantren. Di sisi lain, provinsi dengan jumlah pondok pesantren paling sedikit di Indonesia berada di Papua Barat. Jumlahnya hanya 18 pondok pesantren. Di atas Papua Barat, ada Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara dengan masing-masing 22 pondok pesantren dan 23 pondok pesantren.<sup>30</sup>

#### **4. Organisasi Keagamaan Islam di Indonesia: Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah**

---

<sup>29</sup> Wikipedia. Daftar Perguruan Tinggi...

<sup>30</sup> "Kemenag: Ada Lebih Dari 30 Ribu Pesantren Di Indonesia, Ini Sebarannya | Databoks," 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/06/kemenag-ada-lebih-dari-30-ribu-pesantren-di-indonesia-ini-sebarannya>.

Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah merupakan organisasi sipil bercorak keagamaan (Islam) yang tidak memiliki hubungan struktural secara langsung dengan negara atau lembaga-lembaga pemerintahan. Namun, eksistensi NU dan Muhammadiyah telah ada sebelum bangsa ini menjadi negara yang berdaulat pada 1945. NU didirikan 1926 dan Muhammadiyah lebih awal lagi, yaitu di 1912. Sejak awal berdiri, NU dan Muhammadiyah memiliki perhatian yang sangat serius terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Itulah sebabnya, hingga kini NU dan Muhammadiyah memiliki aset ribuan lembaga pendidikan, dari tingkat paling dasar (PAUD) sampai perguruan tinggi (PT). NU dikenal memiliki jaringan lembaga pendidikan pesantren yang sangat luas, begitu pula dengan Muhammadiyah dikenal karena jumlah aset lembaga pendidikan formalnya yang juga banyak .

NU dan Muhammadiyah, dengan demikian, tidak diragukan lagi telah nyata membantu dan meringankan tugas negara, yang jika bidang pendidikan sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah, pasti kewalahan dan tidak akan mampu menjalankannya secara maksimal. Pada konteks inilah, NU dan Muhammadiyah sebagai bagian dari civil society ikut menyukseskan tumbuh berkembang iklim demokrasi dan perdamaian di Indonesia. Kontribusi NU-Muhammadiyah Secara empiris, kontribusi NU dan Muhammadiyah di bidang pendidikan itu setidaknya bisa diamati dari tiga fakta berikut.

Pertama, NU dan Muhammadiyah mengimplementasikan paradigma inklusif. Di lingkungan pesantren atau lembaga pendidikan NU, perjumpaan lintas etnik dan agama-agama berupa pertukaran pelajar; kunjungan dari/ke komunitas agama lain hingga belajar Islam di pesantren; menjadi fenomena yang lazim terjadi. NU melakukan internalisasi terhadap diktum bahwa perbedaan itu ialah kasih sayang (rahmah), sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Sementara itu, pengalaman Muhammadiyah, telah melampaui wacana pluralisme agama, yaitu memberi kesempatan kepada siswa-siswi nonmuslim untuk bersekolah di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Berdasarkan penelitian Abdul Mu'ti dan Fajar Rizal Ul Haq berjudul Kristen-Muhammadiyah, menunjukkan sekolah-sekolah Muhammadiyah di tiga kota yang menerima siswa dan guru beragama Islam, Kristen, Katolik, serta menerima dari berbagai suku, yakni di Kupang (NTT), Yapen Waropen (Papua), dan Putussibau (Kalimantan Barat). Praktik pendidikan Muhammadiyah dengan menerima siswa dan guru nonmuslim ini dapat meningkatkan public awareness terhadap Islam di kalangan nonmuslim.

Kedua, orientasi pendidikan yang dikembangkan NU maupun Muhammadiyah memiliki sinergi dengan misi pendidikan nasional yang dicanangkan pemerintah. Berkaitan dengan ideologi, misalnya, bahwa pesantren dan lembaga pendidikan di lingkungan NU-Muhammadiyah tidak mengajarkan perbuatan-perbuatan makar/kriminal yang menjadi ‘musuh’ negara, seperti kasus terorisme. Implementasi dari praksis pendidikan bagi NU-Muhammadiyah sangat komplementer dengan visi dan misi pendidikan nasional bangsa, seperti penguatan karakter peserta didik dengan cara ikut menyelenggarakan upacara setiap hari-hari tertentu, sinergi kurikulum nasional dengan lokal ke-NU-Muhammadiyah-an, dan lain sebagainya.

Ketiga, pendidikan NU-Muhammadiyah telah melahirkan tokoh-tokoh perubahan bangsa, dari sebelum bangsa Indonesia merdeka sampai sekarang, seperti kontribusi KH Hasyim Asy’ari dan KH Ahmad Dahlan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, KH Wahid Hasyim, Ki Bagoes Hadikusumo sebagai anggota BPUPKI yang ikut andil dalam merumuskan ideologi negara (Pancasila), hingga Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dikenal luas tidak hanya oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga dunia internasional sebagai pendorong laju perubahan sosial dan terpilih menjadi Presiden ke-4 Republik Indonesia. Tokoh-tokoh lain dari lulusan pendidikan NU-Muhammadiyah sampai sekarang terus bermunculan dan menjadi mesin penggerak seiring perubahan zaman, baik di bidang politik, ekonomi, kebudayaan, maupun termasuk pendidikan.<sup>31</sup>

### **Jejaring Pendidikan Islam Indonesia di Level Internasional**

Pengertian jejaring internasional dapat dipahami sebagai sebuah wadah kerja sama antara satu unit lembaga ke lembaga yang lain, jika hal tersebut terkait lembaga pendidikan. Dengan demikian, pemahaman kerja sama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia, jika hal tersebut dipahami sebagai sebuah hubungan internasional antar lembaga. Jejaring internasional merupakan perwujudan dari hubungan antar pemimpin yang berpijak pada kepentingan lembaga yang dipimpinnya. Kepentingan nasional berkaitan dengan tujuan nasional dan internasional dalam kurun waktu

---

<sup>31</sup> mediaindonesia.com developer, “Pendidikan, Perdamaian, dan Kontribusi NU-Muhammadiyah,” 2023, <https://mediaindonesia.com/opini/217565/pendidikan-perdamaian-dan-kontribusi-nu-muhammadiyah>.

tertentu yang berisi sasaran-sasaran nyata yang harus diwujudkan. Keberhasilan mewujudkan tujuan tersebut dapat menjamin meningkatkan kualitas lembaga.

Selain tentu akan memperoleh keuntungan yang akan mampu meningkatkan kualitas persaingan sebuah lembaga pendidikan tinggi. Dalam hubungan internasional yang mengkaji interaksi antar aktor seperti: State, NonGovernment Organization (NGO), Internasional Non-Government Organization (INGO) maupun antar Individu. Interaksi tersebut dilandasi dengan adanya persaingan, kerjasama, dan konflik. jika melihat Interaksi antar aktor dalam hubungan internasional dapat dikatakan semua itu dilandasi dengan adanya persaingan antar aktor (Negara) tersebut untuk mencapai kepentingan nasionalnya, untuk dapat merealisasikan itu semua maka dibutuhkan sebuah kerjasama, namun jika hubungan tersebut mengalami kebuntuan maka akan tercipta sebuah konflik. Hal tersebut juga dapat dikembangkan pada tatanan kerjasama yang dibangun oleh jejaring internasional yang di pelopori oleh pimpinan perguruan tinggi. Kebutuhan akan jaringan yang luas, tidak hanya sebatas nasional menjadi kebutuhan agar lembaga pendidikan tinggi mampu meningkatkan persaingan pada taraf global. Untuk mewujudkan kerjasama itu tentu ada feedback yang menguntungkan demi kemajuan sebuah lembaga pendidikan tinggi.<sup>32</sup>

Isu-isu dalam jejaring internasional merupakan wacana bagi setiap aktor yang ada untuk dapat mencapai kepentingan maupun merespon apa yang terjadi. Isu-isu dalam hubungan internasional terdiri dari kepentingan pertukan pelajar, pemberian beasiswa pendidikan, pertukaran dosen, dan berbagai kerjasama antar lembaga yang dapat dijadikan sarana keilmuan yang luas. Hal tersebut terkait kepentingan peran kepemimpinan dapat menerapkan kebijakan lembaganya terhadap isu yang sedang berkembang untuk merespon fenomena dalam kebutuhan global. Di era global saat ini hampir setiap negara melakukan kerjasama internasional untuk memenuhi kebutuhannya. Lebih lagi kerjasama kelembagaan pendidikan tinggi yang terjalinnya hubungan antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan. Kerjasama antar perguruan tinggi bentuknya bermacam-macam, mulai kerjasama pertukaran pelajar, pertukaran pendidik, hingga kerja sama pengembangan kelembagaan.

Melalui berbagai jejaring yang ada tersebut tentu kita memiliki tujuan dan harapan besar dalam membangun sebuah kelembagaan perguruan tinggi. Lebih lagi, peran kepemimpinan menjadi tombak terdepan dalam memformulasikan jejaring internasional

---

<sup>32</sup> Bashori Bashori, "Transformasi Kepemimpinan Perguruan Tinggi dan Jejaring Internasional," *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (10 Desember 2019), <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i1.1153>.

secara baik dan tepat guna menjadikan lembaga pendidikan yang terpercaya sehingga mampu bersaing secara kompetitif. Melihat perkembangan yang begitu pesat, pemimpin dituntut mampu memiliki jejaring yang luas agar dapat memiliki hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Sebagai aktor sentral di lembaga perguruan tinggi, maka jejaring internasional bukan sebuah tawaran, akan tetapi menjadi sebuah keharusan dalam membangun lembaga yang bermutu. Selain itu, jejaring internasional akan membawa dampak kemanfaatan hasil kerjasama dalam memajukan lembaga pendidikan yang dipimpinnya.<sup>33</sup>

### **Pendidikan Islam di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Sistem Pendidikan Nasional**

Keberadaan pendidikan Islam saat ini semakin diakui, hal ini dibuktikan dengan diintegrasikannya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Daulay menyatakan bahwa setidaknya ada tiga hal yang terkait dengan pendidikan Islam dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, yaitu: *Pertama*, kelembagaan formal, nonformal, dan informal didudukkannya lembaga madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang diakui keberadaannya setara dengan lembaga pendidikan sekolah. *Kedua*, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yaitu pelajaran agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. *Ketiga*, pendidikan Islam sebagai nilai, terdapat seperangkat nilai-nilai islami dalam sistem pendidikan nasional.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Bashori. Transformasi Kepemimpinan Perguruan...

<sup>34</sup> Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

## **1. Pendidikan Islam sebagai Lembaga**

Kelembagaan formal, nonformal, dan informal pendidikan Islam dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, antara lain:<sup>35</sup>

- a. Lembaga Pendidikan Formal Pasal 17: Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 18: Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 20: Pendidikan Tinggi dapat berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas. 2
- b. Lembaga Pendidikan Nonformal Pasal 26: Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis.
- c. Lembaga Pendidikan Informal Pasal 27: Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- d. Pendidikan Usia Dini Pasal 28: Pendidikan usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- e. Pendidikan keagamaan Pasal 30: Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli agama. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaya samena, dan bentuk lain yang sejenis.

## **2. Pendidikan Islam sebagai Mata Pelajaran**

---

<sup>35</sup> Daulay; Huda, "Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Dan Upaya Penguatannya Dalam Sistem Pendidikan Nasional"; "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," 2003.

Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran setidaknya diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, yang tertuang dalam beberapa pasal, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Pasal 36 ayat 3 menjelaskan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: Peningkatan iman dan taqwa; peningkatan akhlak mulia; peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; keragaman potensi daerah dan lingkungan; tuntutan pembangunan daerah dan nasional; tuntutan dunia kerja; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni; Agama; Dinamika perkembangan global; serta Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- b. Di pasal 37 ayat 1, kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: Pendidikan agama; Pendidikan kewarganegaraan; Bahasa; Matematika; Ilmu pengetahuan alam; Ilmu pengetahuan sosial; Seni dan budaya; Pendidikan jasmani dan olahraga; Keterampilan/kejuruan; dan Muatan lokal.
- c. Di pasal 37 ayat 2, Kurikulum pendidikan tinggi wajib: Pendidikan agama; Pendidikan kewarganegaraan; dan Bahasa.

### **3. Pendidikan Islam sebagai Nilai**

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Pasal 12 ayat a menyebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak peserta didik, disebutkan; setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Dalam bagian penjelasan diterangkan pula pendidik dan atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan diatur dalam pasal 41 ayat 3.<sup>37</sup>

### **Kesimpulan**

---

<sup>36</sup> Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*; Huda, "Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Dan Upaya Penguatannya Dalam Sistem Pendidikan Nasional"; "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional."

<sup>37</sup> Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*; Huda, "Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Dan Upaya Penguatannya Dalam Sistem Pendidikan Nasional"; "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional."

Masalah pendidikan memang tidak bisa dilepaskan adanya faktor politik yang melatarbelakanginya sejak belum berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini tentu sekak jaman penjajahan di mana pendidikan Islam selalu dibatasi oleh kolonial. Sampai Indonesia merdeka pun polemik ini terjadi sejak berdirinya bangsa ini. Perkembangan pendidikan Islam secara nasional didukung oleh aspek historis, yuridis, lembaga, dan organisasi keagamaan Islam. Sedangkan perkembangan pendidikan Islam secara internasional lebih dipengaruhi dari faktor kepemimpinan lembaga pendidikan Islam itu sendiri dalam membangun jaringan. Ada tiga hal yang terkait dengan pendidikan Islam dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003: *Pertama*, kelembagaan formal, nonformal, dan informal didudukkannya lembaga madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang diakui keberadaannya setara dengan lembaga pendidikan sekolah. *Kedua*, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yaitu pelajaran agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. *Ketiga*, pendidikan Islam sebagai nilai, terdapat seperangkat nilai-nilai islami dalam sistem pendidikan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Teuku Ibrahim. *Kontribusi Samudra Pasai terhadap Studi Islam Awal di Asia Tenggara*. Jogjakarta: Ceninets, 2005.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Bashori, Bashori. “*Transformasi Kepemimpinan Perguruan Tinggi dan Jejaring Internasional.*” *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (10 Desember 2019). <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i1.1153>.
- Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- developer, mediaindonesia com. “*Pendidikan, Perdamaian, dan Kontribusi NU-Muhammadiyah,*” 2023. <https://mediaindonesia.com/opini/217565/pendidikan-perdamaian-dan-kontribusi-nu-muhammadiyah>.

Huda, Miftahul. “Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia Dan Upaya Penguatannya Dalam Sistem Pendidikan Nasional.” *Journal of Islamic Education Research* 1, no. 02 (29 Juni 2020): 39–53. <https://doi.org/10.35719/jier.v1i02.24>.

“Kemenag: Ada Lebih Dari 30 Ribu Pesantren Di Indonesia, Ini Sebarannya | Databoks,” 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/06/kemenag-ada-lebih-dari-30-ribu-pesantren-di-indonesia-ini-sebarannya>.

Mansur. *Peradaban Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jogjakarta: Global Pustaka Utama, 2004.

Moon, Al. “Berapakah Jumlah RA & Madrasah di Indonesia?” *Ayo Madrasah* (blog), 2023. <https://www.ayomadrasah.id/2016/07/jumlah-ra-madrasah-di-indonesia.html>.

Muhaimin. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Mulkhan, Abdul Munir. *Nalar Spiritual Pendidikan -Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2002.

Nabila, Dila Fitri, dan Abd Hayyi. “Dampak Globalisasi Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia.” *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (16 September 2019): 552–73.

Rahman, Kholilur. “Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia.” *Jurnal Tarbiyatuna : Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 1 (15 Februari 2018): 1–14.

Sakir, Moh. “Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional.” *Cendekia* 12, no. 1 (2014).

Salmaa. “Studi Literatur: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Teknik Pengumpulan Datanya.” *Penerbit Deepublish* (blog), 17 Maret 2023. <https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/>.

Saputra, Fedry. “Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia.” *AL-HIKMAH (Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam)* 3, no. 1 (22 Januari 2021): 98–108. <https://doi.org/10.36378/al-hikmah.v3i1.1137>.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” 2003.

Wikipedia. “Daftar perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia.” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 2023.  
[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daftar\\_perguruan\\_tinggi\\_Islam\\_negeri\\_di\\_Indonesia&oldid=22669869](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daftar_perguruan_tinggi_Islam_negeri_di_Indonesia&oldid=22669869).